

## Accountability of Layanan Dasar by school counselor in junior high school in East Jakarta on school principals perspective

Aip Badrujaman<sup>1</sup>, Meithy Intan Rukia Luawo<sup>2</sup>, Wening Cahyawulan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Jakarta

\*Corresponding author, e-mail: [authoraip\\_bj@unj.ac.id](mailto:authoraip_bj@unj.ac.id)

### Abstract

The objective of this research is to describe of the accountability of Layanan Dasar school counselor on school principals' perspective. The study used descriptive study methods, used sampling technique was convenience sampling with a sample of 33 school principals, and instruments used were Mixed Standard Scale for Evaluating Student Behavior and analysis data used descriptive. The results of the study show that overall the level of accountability of guidance and counseling programs in schools in East Jakarta is at a low level (49%). Second, achievements based on indicators are not significantly different (10%). Third, the highest indicator of accountability is the responsibility, while the lowest indicator is the feedback mechanism. Fourth, each school falls into the low category of 50%, medium 30%, and high 20%. Based on the results there needs to be an effort to improve the accountability of the guidance and counseling program and base of feedback mechanism indicators, teacher Guidance and counseling must create a mechanism by which the principal can submit input.

**Keyword:** layanan dasar, accountability, guidance and counseling, school principals

## Akuntabilitas Kepala Sekolah di SMP Negeri se-Jakarta Timur

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran akuntabilitas layanan dasar di SMPN Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah. Penelitian menggunakan metode studi deskriptif. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian adalah convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara keseluruhan tingkat akuntabilitas program BK pada sekolah di Jakarta Timur berada pada tingkat rendah (49%). Kedua, Capaian berdasarkan indikator tidak berbeda secara signifikan (10%). Ketiga, Indikator akuntabilitas yang paling tinggi capaiannya adalah tanggungjawab, sedangkan indikator yang paling rendah adalah mekanisme umpan balik. Keempat, SMPN yang masuk dalam kategori rendah 50%, sedang 30%, dan tinggi 20%. Berdasarkan implikasi di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan akuntabilitas program BK, meliputi; (1) Perlu adanya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas program BK. Ini dapat dilakukan dengan cara guru melakukan refleksi diri. (2) Khusus untuk indikator mekanisme umpan balik, guru BK harus segera membuat suatu mekanisme dimana kepala sekolah dapat menyampaikan masukan. Ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program BK.

**Kata Kunci:** layanan dasar, akuntabilitas, BK, kepala sekolah

**How to Cite:** Badrujaman, A., Luawo, M. I. R., & Cahyawulan, W. (2018). Accountability of Layanan Dasar by school counselor in junior high school in East Jakarta on school principals perspective. *Konselor*, 7(4), 145-150. <https://doi.org/10.24036/020187410740-0-00>



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author

## Pendahuluan

Penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah sudah lebih dari 30 tahun. Disamping pencapaian positif, berupa keabsahan secara yuridis, penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah masih diliputi berbagai permasalahan. Prof. Buchori (2004) mengemukakan bahwa tenaga guru BK belum mendapatkan tempat yang layak di kebanyakan sekolah. Pendapat Buchori sejalan dengan fenomena yang terjadi pada sekolah menengah atas di Jakarta seperti SMA 70, SMA 39, SMA 1, SMA 14, SMA 68, serta SMA 8 yang menghilangkan jam bimbingan yang dilakukan melalui tatap muka 1 jam per-minggu. Bahkan,

penghapusan jam bimbingan terjadi juga pada jenjang SMP. Beberapa sekolah SMP Negeri di Jakarta seperti yang terjadi di SMP 158 dan SMP 252.

Rendahnya dukungan sekolah terhadap penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah tidak dapat dipisahkan dari masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penyelenggaraan program yang dilakukan oleh guru BK. Studi yang dilakukan oleh Muryani mengenai kualitas pengelolaan program bimbingan dan konseling SMA di Kecamatan Kembangan Jakarta barat menunjukkan pencapaian kualitas perencanaan program bimbingan dan konseling sebesar 19,54 % (pencapaian maksimum = 100%), dan pencapaian pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang juga hanya 19,81% pada skala yang sama. Sebuah studi yang dilakukan oleh Badrujaman (2011) mengenai efektifitas program bimbingan di salah satu SMA di DKI Jakarta memperkuat temuan Muryani mengenai lemahnya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Badrujaman, dalam penelitiannya, menemukan bahwa guru BK tidak membuat perencanaan program bimbingan secara baik. Selain itu, strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan juga tidak tepat. Kondisi ini membuat guru BK melaksanakan program bimbingan dan konseling secara insidental, dan kurang terencana. Akibatnya proses bimbingan menjadi tidak menarik dan tidak menyentuh esensi (kebutuhan) dari siswa. Bahkan tidak jarang siswa akhirnya tidak memperdulikan kegiatan bimbingan yang diselenggarakan oleh guru BK. Kondisi ini akhirnya membuat tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai melalui kegiatan bimbingan tersebut. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada minimnya siswa yang dapat mencapai tugas perkembangannya sebagai akibat program bimbingan.

Hasil penelitian di atas paling sedikit memberikan penjelasan pada pertanyaan mengapa belakangan ini banyak sekolah di DKI Jakarta tidak lagi memiliki jam bimbingan. Meskipun kondisi ini berhubungan dengan kebijakan kepala sekolah, akan tetapi hal itu juga dipengaruhi oleh bagaimana kepala sekolah melihat kegiatan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan. Ketika penyelenggaraan program bimbingan dan konseling dilakukan tanpa perencanaan yang baik, strategi yang tidak tepat, proses yang tidak terorganisasikan dengan baik, maka bisa jadi itulah fenomena yang dilihat kepala sekolah dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakannya. Ini tidak berarti sudah sepantasnya jam bimbingan BK itu ditiadakan, akan tetapi terdapat alasan mengapa kepala sekolah menghapus jam bimbingan, dan itu berhubungan dengan akuntabilitas program bimbingan itu sendiri.

Akuntabilitas merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari oleh setiap profesional, termasuk juga guru BK. White (2007) mengutip pendapat para ahli seperti Studer yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tuntutan bagi pendidik termasuk juga konselor untuk efektifitas dari program yang diselenggarakannya. Perera-Diltz dan Mason (2010) yang menyatakan bahwa konselor diminta untuk terlibat dalam praktik akuntabilitas yang memberikan dukungan efektifitas program BK di sekolah.

Akuntabilitas program bimbingan dan konseling yang baik akan membuat para stakeholder yang memiliki kepentingan berkenaan dengan penyelenggaraan program bimbingan dan konseling memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada program dan personel bimbingan dan konseling. Program yang akuntabel adalah program yang dapat memberikan penjelasan kepada stakeholder, apakah itu guru, orang tua, kepala sekolah, dan juga siswa mengenai mengapa satu program dilaksanakan dan mengapa program yang lain tidak dilaksanakan. Selain itu, program yang akuntabel adalah program yang dapat diketahui sejauh mana pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ketika guru BK dapat memberikan informasi tersebut, maka kepercayaan stakeholder menjadi meningkat.

1. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah, meliputi;
2. Bagaimanakah tingkat akuntabilitas program bimbingan dan konseling SMP di Jakarta Timur?
3. Faktor apa yang mempengaruhi akuntabilitas program bimbingan dan konseling SMP di Jakarta Timur?
4. Bagaimanakah cara meningkatkan akuntabilitas program bimbingan dan konseling SMP di Jakarta Timur?

Agar penelitian dapat memberikan mengkaji permasalahan secara mendalam, maka peneliti membatasi masalah pada: (1) akuntabilitas berdasarkan tinjauan kepala sekolah dan (2) program BK dibatasi pada layanan dasar

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; "bagaimanakah tingkat akuntabilitas layanan dasar SMP Negeri di Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah?".

Akuntabilitas program bimbingan dan konseling merupakan suatu topik penting dalam pembahasan mengenai program bimbingan dan konseling di sekolah. Diskusi mengenai akuntabilitas program bimbingan dan konseling sebagaimana yang telah dicatat oleh Dahir dan Stone (2011) telah terjadi lebih dari 25 tahun (lihat juga Isaac, 2003). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Gysbers (2004) yang menyatakan bahwa isu akuntabilitas adalah isu hangat dalam dialog profesional.

Pada era sekarang ini, akuntabilitas tidak lagi menjadi isu, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Diltz dan Mason (2010) sependapat dengan para ahli seperti Housley, Mc Daniel, Nims, James, Hughey yang menyatakan bahwa konselor diminta untuk terlibat dalam praktik akuntabilitas yang memberikan dukungan efektifitas program BK di sekolah. Memperkuat pendapat Perera-Diltz dan Mason (2010) mencatat adanya peningkatan tuntutan akuntabilitas terhadap program konseling. Hal senada juga diungkapkan oleh White (2007) mengutip pendapat Studer yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan tuntutan bagi pendidik termasuk juga konselor untuk efektifitas dari program yang diselenggarakannya. Bahkan Gysbers (2004) menyebutkan bahwa akuntabilitas bukan hanya sebuah tuntutan akan tetapi menjadi sebuah kebutuhan bagi konselor.

Akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang tidak bersifat dikotomis. Bahkan, akuntabilitas merupakan keadaan yang bersifat dinamis, yang memiliki rentangan secara kontinum. Tinggi atau rendah, naik atau turunnya keadaan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada dalam konsep akuntabilitas tersebut. Komponen dalam akuntabilitas dengan sendirinya dapat dipandang sebagai indikator-indikator yang menjadi dasar ukuran akuntabilitas itu sendiri. Badrujaman (2011) mengidentifikasi 5 komponen/indikator akuntabilitas konselor dalam menyelenggarakan program BK, yaitu; mampu menerima tanggungjawab, melakukan komunikasi, menjelaskan, menetapkan mekanisme umpan balik, serta melakukan perbaikan program bagi stakeholder.

Akuntabilitas merupakan kebutuhan dan tuntutan, akan tetapi masih penuh dengan tantangan. Studi yang dilakukan oleh Astramovich (2004) pada 241 konselor sekolah di Amerika menunjukkan bahwa konselor tidak menggunakan data dari program yang mereka selenggarakan untuk modifikasi atau perbaikan program yaitu sebanyak 50,4%, dan hanya 5,2 % yang melakukannya setiap hari, 7,4 % yang melakukannya setiap minggu, 14,3 % yang melakukannya, 8,3 % melakukannya dua kali, dan 14,3 % yang pernah melakukannya sekali. Hal yang menarik dari studi tersebut, didapati pula bahwa 90 % dari seluruh konselor tersebut sadar bahwa melakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas program yang mereka selenggarakan menjadi sebuah kebutuhan pada era sekarang. Temuan Astramovich diperkuat oleh hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Diltz dan Mason (2010) yang mengungkapkan bahwa hanya terdapat sekitar 50% konselor sekolah yang melakukan evaluasi dan hanya 33% yang menyampaikan informasi hasil evaluasi kepada stakeholder sebagai bentuk praktik akuntabilitas.

## Metode

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat akuntabilitas layanan dasar pada SMP Negeri di Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif jenis survey. Metode penelitian survey bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi pada suatu situasi. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan metode ini adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu memperoleh gambaran mengenai tingkat akuntabilitas layanan dasar pada SMPN di Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah. Populasi penelitian adalah kepala sekolah SMP Negeri di Jakarta Timur. Sampel diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket akuntabilitas kepada guru BK. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Instrumen disusun secara tertutup sehingga responden hanya memiliki alternatif jawaban yang sesuai dengan yang telah disediakan. Peneliti menggunakan skala Mixed Standard Scale for Evaluating Student Behavior. Skala ini dipilih karena mengukurfakta. Ini penting dalam rangka mereduksi bias jawaban dari satu responden dengan responden yang lain. Skala Mixed Standard Scale for Evaluating Student Behavior ini dikombinasikan dengan skala direct behavior rating. Skala ini digunakan dalam rangka menjaring fakta dalam rentang yang lebih luas yaitu 1 sampai dengan 10 dan terdapat keterangan pada titik ekstrim dan tengah.

Pengujian validitas butir menggunakan teknik korelasi product moment pearson, dan pengujian realibilitas digunakan rumus alpha cronbach. Berdasarkan ujicoba instrument terhadap 75 butir, dengan taraf

signifikansi 95%, maka diketahui terdapat 50 butir tergolong valid dan 25 butir tergolong buruk. Berdasarkan pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach, diketahui bahwa koefisien reliabilitas sebesar 0,92. Ini berarti instrument layak digunakan karena berada pada kategori sangat baik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa deskriptif. Analisa data disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan interpretasikan dalam suatu uraian berbentuk presentase.

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa tingkat akuntabilitas program bimbingan dan konseling sebesar 49,2%. Capaian ini setara dengan 4,9 (skala 1 sampai dengan 10). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Tingkat akuntabilitas keseluruhan**

Tingkat akuntabilitas	Persentase	Rerata per-butir
Keseluruhan	49,2	4,9

Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa akuntabilitas Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah umumnya tergolong dalam kategori rendah yaitu sebesar 50%. Sedangkan Sekolah yang tergolong dalam kategori sedang 30%, dan 20 % masuk dalam kategori tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

**Tabel 2. Profil Akuntabilitas SMPN Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah**

Kategori	Persentase
Tinggi	20
Sedang	30
Rendah	50

Ditinjau dari indikator akuntabilitas, maka diketahui bahwa akuntabilitas pada indikator tanggung jawab memiliki tingkat paling tinggi dibandingkan dengan indikator yang lain, yaitu sebesar 52%. Sedangkan akuntabilitas pada indikator menjelaskan program BK mencapai 45%. Indikator komunikasi dan adanya perbaikan memiliki capaian yang sama yaitu 50%. Sedangkan indikator yang paling kecil capaiannya adalah adanya mekanisme umpan balik yaitu sebesar 49%.

Berdasarkan data di atas, maka diketahui bahwa secara umum tingkat akuntabilitas program BK SMPN di Jakarta Timur relative rendah. Hal ini tampak dari capaian tingkat akuntabilitas sebesar 49% atau 4,9 pada skala pilihan jawaban. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Linda (2010) mengenai kepuasan siswa terhadap program bimbingan yang juga berada pada kategori cukup. Penelitian akuntabilitas program BK dalam tinjauan siswa juga menunjukkan informasi yang berbeda yaitu pada tingkat sedang. Hasil ini tentu saja harus menjadi bahan refleksi bagi guru Bimbingan dan Konseling yang ada di sekolah untuk melakukan upaya perbaikan sehingga dimungkinkan terjadinya peningkatan akuntabilitas.

Komposisi akuntabilitas berdasarkan indikator pada dasarnya tidak terlalu signifikan karena capaian tertinggi dan terendah hanya berbeda 10 %. Meskipun demikian, informasi mengenai akuntabilitas berdasarkan indikator harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan. Indikator akuntabilitas yang paling tinggi capaiannya adalah tanggungjawab. Hal ini berarti bahwa siswa memandang bahwa guru BK memiliki tanggungjawab yang cukup baik dalam menyelenggarakan program bimbingan dan konseling di sekolah. Pada hakikatnya akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan. Bavlly dalam Wood Jr. & Winston (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas menyiratkan adanya penerimaan tanggungjawab. Connors et al. dalam Wood Jr. & Winston (2005) mengungkapkan bahwa menerima tanggungjawab itu berarti siap menghadapi kenyataan, termasuk didalamnya masalah dan tantangan. Penerimaan tanggungjawab juga berarti bahwa pelaksana program tidak ingin menyembunyikan suatu kebenaran meskipun kebenaran adalah tidak tercapainya program. Indikator yang paling rendah capaiannya adalah mekanisme umpan balik. Mekanisme umpan balik berada pada kategori cukup berarti bahwa masih ada ruang dimana stakeholder (siswa) kurang dapat memberikan masukan pada pengelola program (guru BK). Ryan (2005) mengemukakan bahwa akuntabilitas harus ditandai oleh adanya peluang untuk mengeluh, dan adanya prosedur untuk melawan kesepakatan.

Rendahnya akuntabilitas guru BK SMPN Jakarta Timur dalam menyelenggarakan layanan dasar sejalan dengan temuan peneliti sebelumnya yang menunjukkan akuntabilitas konselor sekolah di Amerika masih tergolong rendah (Perera-Diltz & Mason, 2010). Praktik akuntabilitas kuat hubungannya dengan evaluasi program BK. Bahkan, beberapa ahli seperti Gysbers, Myrick menggunakan istilah akuntabilitas untuk kegiatan evaluasi program BK di sekolah. Oleh sebab itu, maka salah satu jalan untuk meningkatkan praktik akuntabilitas guru BK dalam menyelenggarakan layanan dasar adalah meningkatkan kemampuan guru Bk dalam melakukan evaluasi program BK. Fairchild (Astramovich, 2004) mengungkapkan bahwa kurangnya pendidikan dan latihan mengenai penelitian dan evaluasi program menjadi faktor utama yang menjadi penyebab rendahnya keterampilan evaluasi program bimbingan dan konseling. Sejalan dengan itu, Schaffer & Atkison (Trevisan & Hubert, 2001) mengatakan bahwa "most school counselors do not receive program evaluation training during pre-service experiences". Trevisan dan Hubert (2001) berdasarkan studi evaluasi yang dilakukannya merekomendasikan perlunya pelatihan evaluasi program agar kegiatan evaluasi dapat terlaksana dengan baik. Pentingnya program pendidikan dan latihan mengenai keterampilan evaluasi program bimbingan dan konseling pada akhirnya perlu menjadi perhatian akademisi dan praktisi bimbingan dan konseling.

Di Indonesia, keterampilan evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang konselor. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 disebutkan bahwa menilai proses dan hasil kegiatan Bimbingan dan Konseling merupakan kompetensi professional yang harus dimiliki seorang konselor. Sebagai konsekuensi logis dari standar kompetensi konselor, maka Jurusan Bimbingan dan Konseling Se-Indonesia bersepakat untuk mengembangkan kurikulum nasional yang memunculkan mata kuliah evaluasi dan supervisi bimbingan dan konseling berbobot 2 sks.

Mata kuliah evaluasi dan supervisi BK merupakan mata kuliah yang berisi dua kajian, yaitu kajian evaluasi program dan supervisi. Kesepakatan mengenai bobot dan isi mata kuliah membuat evaluasi program bimbingan dan konseling memiliki bobot yang relatif sedikit dibandingkan dengan substansi kajian yang seharusnya dipelajari oleh mahasiswa. Bobot 2 sks yang menjadi kesepakatan belum dapat menyentuh aspek keterampilan sebagaimana yang dituntut dalam standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor.

Pendidikan dan pelatihan bagi calon konselor mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah upaya sistematis untuk membekali calon konselor seperangkat pengetahuan dan keterampilan mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling. Eschenauer & Hayes (2005) mengatakan bahwa mahasiswa program konseling butuh untuk diberikan seperangkat keterampilan untuk memahami metode penelitian dan memiliki kesempatan untuk mempraktikannya dalam training yang diikuti. Badrujaman (2011) menyebutkan bahwa keterampilan evaluasi program bimbingan dan konseling berisi pengkajian terhadap konsep dan aplikasi teori evaluasi program bimbingan dan konseling. Lebih lanjut, Badrujaman (2011) merinci kajian evaluasi program bimbingan dan konseling meliputi; implementasi evaluasi program Bimbingan dan Konseling, konsep dasar evaluasi program (pengertian, perbedaan dengan mata pelajaran, tujuan, kriteria dan standar, serta metode evaluasi), model-model evaluasi program bimbingan dan konseling, praktikum evaluasi program bimbingan, serta praktikum evaluasi program konseling. Ketidaksiharian antara substansi kajian dan bobot mata kuliah boleh jadi menjadi penyebab rendahnya keterampilan evaluasi program bimbingan dan konseling guru BK SMP Negeri di Jakarta Timur.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab empat, maka dapat diambil beberapa kesimpulan penelitian, meliputi;

1. Secara keseluruhan tingkat akuntabilitas program BK pada sekolah di Jakarta Timur dalam tinjauan kepala sekolah berada pada tingkat rendah (49%).
2. Capaian berdasarkan indikator tidak berbeda secara signifikan (10%)
3. Indikator akuntabilitas yang paling tinggi capaiannya adalah tanggungjawab, sedangkan indikator yang paling rendah adalah mekanisme umpan balik.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka terdapat beberapa implikasi penelitian, meliputi;

1. Capaian akuntabilitas pada kategori rendah memberikan informasi mengenai kekurangan pada program BK
2. Kurangnya ruang bagi kepala sekolah untuk menyampaikan masukan dapat membuat kepala sekolah mengalami ketidakpedulian terhadap program BK.

Berdasarkan implikasi di atas, maka peneliti mengajukan beberapa saran terkait dengan akuntabilitas program BK, meliputi;

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan akuntabilitas program BK. Ini dapat dilakukan dengan cara guru melakukan refleksi diri.
2. Khusus untuk indikator mekanisme umpan balik, guru BK harus segera membuat suatu mekanisme dimana kepala sekolah dapat menyampaikan masukan. Ini dapat dilakukan dengan kegiatan konsultasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan program BK.

## Daftar Rujukan

- Astramovich, R.L. (2007). Program evaluation: The accountability bridge model for counselors. *Journal of Counseling and Development*, 85(2), 162-172.
- Badrujaman, A. (2011). *Evaluasi program bimbingan konseling*. Jakarta: Indeks.
- Dahir, C.A. & Stone, C.B. (2009). School counselor accountability: The path to social justice and systemic change. *Journal of Counseling & Development*, 87(1), 12-20.
- Eschenauer, R. & Chen-Hayes, S.F. (2005). The transformative individual school counseling model: an accountability model for urban school counselors. *Professional School Counseling*, 8(3), 244.
- Gysbers, N.C. (2004). Comprehensive guidance and counseling programs: The evolution of accountability. *Professional School Counseling*, 8(1), 1-14.
- Isaac, M.L. (2003). Data-driven decision making: The engine of accountability. *Professional School Counseling*, 6(4), 288-295.
- Perera-Diltz, D.M. & Mason, K.L. (2010). An Exploration of Accountability Practices of School Counselors: A National Study. *Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research*, 38(1), 52-70.
- Ryan, K.E. (2005). Making educational accountability more democratic. *American Journal of Evaluation*, 26(4), 532-543.
- Trevisan, M. S. & Hubert, M. (2001). Implementing comprehensive guidance program evaluation support: Lessons learned. *Professional School Counseling*, 4(3), 225-228
- White, F. A. (2007). The professional school counselor's challenge: Accountability. *Journal of Professional Counseling: Practice, Theory & Research*, 35(2), 62.
- Wood Jr, J.A. & Winston, B.E. (2005). Toward a new understanding of leader accountability: defining a critical construct. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 11(3), 84-94.